

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH

Siti Zuliyah

Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Abstract

In supporting the local area development, the village people participation and empowerment are required. The empowerment program is directed more on the village people considering many problems the village people encounters either knowledge, skill, facility or economic ability problems. The village people involvement from the beginning stage includes planning, implementing, monitoring and evaluating stage. The strategy of village people empowerment should take into account both the principles and the methods of people empowerment. The village people empowerment program should be supported by the leadership role and by exploring the local society's value.

Keywords: *strategies and empowerment of rural communities*

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah pada dasarnya memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menjadikan daerah otonom yang mandiri. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Itu berarti pemberian kewenangan otonomi secara luas kepada daerah melalui asas desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi kepada birokrasi pemerintah daerah, juga mencakup pelaksanaan desentralisasi kepada masyarakat yang diimplementasikan melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan merupakan usaha yang dijalankan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar semakin mampu memenuhi kebutuhannya dan semakin dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara sejajar dengan yang lain. Pemberdayaan menumbuhkan jiwa kemandirian dan kreativitas untuk berkembang dengan kekuatan sendiri, tidak tergantung pada bantuan dan perintah dari atas sebagaimana yang ada pada kebijakan sentralistik. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pola pendekatan yang bersifat *botton-up* yang bertujuan menggerakkan potensi masyarakat. Selanjutnya yang akan dicapai lewat pemberdayaan ini adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat di daerah (Reni Renoati, 2003 : 101).

Program pemberdayaan banyak diarahkan pada masyarakat desa atas dasar pertimbangan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan, baik

menyangkut masalah pengetahuan, ketrampilan, fasilitas maupun kemampuan ekonomi. Untuk itu proses pemberdayaan juga perlu dilakukan secara menyeluruh dalam berbagai aspek baik sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana serta ekonomi (Reni Renoati, 2003 : 102)

Secara ekonomi desa ditandai oleh penghidupan penduduknya yang bersumber dari pertanian dan secara sosiologis antara lain ditandai hubungan antar anggota masyarakatnya saling mengenal karena kekerabatan dan karena ikatan tradisi. Peningkatan kualitas hidup di desa ini dapat berarti merubah kebutuhan dan pilihan dari yang sederhana menjadi lebih kompleks. Mengingat pentingnya program tersebut, sudah seharusnya hal itu diperhatikan oleh semua pihak yang menjalankan program pemberdayaan masyarakat, baik pihak pemerintah, Perguruan Tinggi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Oleh karena itu pada tulisan ini akan membahas tentang strategi pemberdayaan masyarakat desa dalam menunjang pembangunan daerah.

B. PERAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk menggali dan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki masyarakat di daerahnya. Dengan mendayagunakan potensi lokal diharapkan program pembangunan yang dijalankan akan dapat berkelanjutan karena didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Dengan adanya keterlibatan masyarakat yang dilakukan sejak tahap perencanaan dan penentuan program maka program yang dikerjakan adalah program yang sesuai dengan kebutuhan, minat dan keinginan masyarakat serta sesuai dengan kondisi daerah maupun potensi masyarakat sehingga manfaat program tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Disamping itu keterlibatan membuat masyarakat lebih meningkat pengetahuan, ketrampilan dan wawasannya, memahami persoalan yang dihadapi dan terbiasa untuk mengambil keputusan sendiri. Dengan ditunjang oleh perasaan ikut memiliki program tersebut, selanjutnya masyarakat memiliki rasa tanggungjawab untuk terus menjalankan dan mengembangkannya secara terus menerus (Reni Renoati, 2003:106). Dalam kebijakan pembangunan yang sentralistik hal tersebut sering terabaikan. Dalam kebijakan ini masyarakat hanya melaksanakan perintah dari atas, tidak memiliki kebebasan untuk ikut mengambil keputusan. Akibatnya masyarakat menjadi tergantung, hanya sekedar menunggu perintah dan mengharapkan bantuan dari pihak luar serta kurang mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan program yang bersangkutan, sehingga program menjadi tidak berkelanjutan (Reni Renoati, 2003:106).

Pada tahap penentuan program, masyarakat dituntut untuk senantiasa melihat, mengamati, mempertimbangkan dan membina berbagai aspek yang terkait untuk mendukung pelaksanaan program. Penanganan yang kurang tepat pada satu aspek atau lebih akan mengurangi kualitas pembangunan yang dihasilkan, bahkan gangguan yang terjadi dapat menghambat pelaksanaannya, sehingga berakibat tidak berhasilnya pembangunan. Aspek tersebut dapat meliputi aspek lingkungan alam, ekonomi, sosial budaya, kesehatan atau pendidikan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Aspek-aspek tersebut dapat menjadi pendukung atau penghambat kegiatan tergantung pada

kebijakan masyarakat dalam menanganinya. Sebagai contoh suatu program pembangunan di bidang industri kecil yang telah didukung sepenuhnya oleh masyarakat disertai dengan bantuan modal menjadi terhambat jika tidak ditunjang pengetahuan yang memadai tentang manajemen pengelolaan industri tersebut.

Kemampuan tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat yang telah mandiri. Dalam hal ini masyarakat harus terlibat secara langsung dalam setiap tahap kegiatan. Kemampuan yang dicapai melalui pemberdayaan harus mencakup kemampuan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi akan diketahui kesalahan dan kendala yang ada sehingga akan diperoleh hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Disinilah inti kegiatan pemberdayaan. Masyarakat yang mandiri sanggup melihat peluang dan memanfaatkan segala potensi yang ada.

C. STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Prinsip-prinsip dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan (*empowerment*) meningkatkan kemampuan untuk memilih dan membuka kesempatan untuk memilih yang berarti adalah peningkatan kemampuan untuk mengambil keputusan dan membuka kesempatan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, terutama yang bersangkutan dengan kehidupan mereka sendiri (Saut M. Lubis, 2000:22). Pemberdayaan mempunyai maksud dan tujuan yang lebih hakiki atau mendalam yakni mempunyai arah ke suatu proses pemampuan, serta lebih memberikan peran atau fungsi yang lebih besar kepada masyarakat. Dalam menuju pada suatu tujuan, masyarakat adalah pelaku atau aktor utama sehingga fungsi masyarakat merupakan sumber kekuatan dalam menggerakkan roda pembangunan. Ide atau buah pikiran untuk menggerakkan motor pembangunan harus disertai dengan kekuatan ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat harus mampu memberikan jaminan sehingga mereka dapat berperan. Sebagai bahan untuk dapat lebih berkembang masyarakat harus mampu memahami potensi yang dimiliki (Sujali, 2001:3). Sementara itu menurut Irwin, pemberdayaan adalah proses memberikan kesempatan dan menciptakan berbagai kontribusi khusus dalam bentuk wawasan, ketrampilan-ketrampilan, energi tertentu atau dalam bentuk memberikan perhatian kepada sesama (L. Hayar Satar, 2002:21).

Jadi upaya memberdayakan masyarakat dilakukan, selain dengan mendudukkan masyarakat sebagai aktor utama juga harus didukung dengan bantuan ekonomi serta membekali dengan berbagai ketrampilan dan pengetahuan. Wawasan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki akan meningkatkan kreativitas yang akan membantu dalam pengambilan keputusan, melihat dan memanfaatkan peluang serta mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaannya. Dengan demikian hasil yang diperoleh juga akan lebih baik.

Berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat desa harus ditujukan untuk membentuk kemandirian. Bantuan ekonomis saja tanpa didukung kemampuan maupun kemauan untuk maju akan kurang bermanfaat. Setelah bantuan tersebut habis kegiatan pembangunan akan berhenti. Masyarakat yang mandiri memiliki kemampuan tidak saja untuk menikmati namun juga melestarikan dan secara terus

menerus mengembangkan hasil pembangunan sehingga akan tercapai pembangunan yang berkelanjutan.

Dikatakan oleh Loekman Soetrisno, suatu pembangunan di pedesaan dikatakan berhasil tidak hanya apabila pembangunan itu berhasil mengurangi jumlah orang miskin atau berhasil menyediakan jalan mulus dan jembatan yang kokoh, namun juga apabila pembangunan itu dapat menimbulkan kemauan dan kemampuan masyarakat desa untuk mandiri. Dalam arti kemauan dan kemampuan masyarakat desa untuk menciptakan pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan, baik yang berasal dari usaha mereka sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat desa itu (Bagong Suyanto, 1996:55). Khairuddin memberikan pendapat senada bahwa arti terpenting dalam pembangunan masyarakat desa bukan hanya sekedar membantu mereka dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi terutama dalam rangka peningkatan taraf hidupnya, tetapi juga merupakan usaha untuk membentuk kemandirian dalam diri mereka yang pada tahap selanjutnya segala permasalahan yang ada di sekitar mereka dapat diselesaikan dan diatasi sendiri (H. Khairuddin, 1992:67).

Kemandirian merupakan suatu tekad dan keyakinan yang berproses mulai dari mengenal dan menyadari keberadaan manusia sebagai individu, maupun sebagai kelompok masyarakat dan mengenal lingkungan tempat mereka tinggal. Masyarakat desa baik sebagai orang perorang maupun kelompok haruslah memahami arti penting serta manfaat untuk membangun diri, dengan mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya maupun lingkungannya, sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupan yang lebih baik. Sebagai suatu proses kemandirian mengandung segi-segi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan sehingga dengan demikian meliputi semua aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat (I Nyoman Bharata, 1981:122).

Terbentuknya kemandirian berawal dari partisipasi, masyarakat akan terdorong untuk berpartisipasi apabila mereka memahami manfaat yang akan diperoleh dari suatu program untuk peningkatan kesejahteraan hidupnya. Untuk itu maka masyarakat perlu dilibatkan sejak awal kegiatan. Hal ini juga penting untuk menumbuhkan perasan ikut memiliki program yang bersangkutan yang selanjutnya akan mendorong mereka untuk meneruskan dan mengembangkannya.

Pelibatan aktif manusia dalam pembangunan yang ideal adalah apabila sejak tahap permulaan pembangunan manusia bisa diikutsertakan, yaitu dari tahap identifikasi kebutuhan apa yang perlu dibangun, untuk siapa, bagaimana, apabila dan bilamana (Emil Salim. 1993:94).

Pada tahap awal permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh masyarakat desa timbul pada umumnya dalam kerangka upaya memenuhi kebutuhan dasarnya (*primary needs*), karena mereka kurang mampu mengidentifikasi, menggali, mengerahkan dan mengarahkan potensi yang terdapat dalam lingkungan masyarakatnya baik yang bersifat alami, manusiawi maupun sosial. Dalam proses selanjutnya, apabila mereka telah mampu mengidentifikasi permasalahan yang sudah barang tentu melalui penimbaan pengalaman, latihan dan lain-lain justru pada tahap berikutnya akan timbul permasalahan. Hal tersebut karena munculnya tuntutan baru yang lebih mengikat. Dalam

tahap tersebut permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana pemanfaatan penggunaan potensi yang ada seefektif dan seefisien mungkin agar potensi yang ada itu tetap merupakan kapasitas yang dapat diarahkan untuk mengatasi masalah pemenuhan kesejahteraan yang semakin meningkat (I Nyoman Bharata, 1981:36).

Agar pembangunan masyarakat desa mencapai keberhasilan, masyarakat desa didudukkan sebagai pelaku utama karena merekalah yang paling tahu kondisi yang ada diwilayahnya, potensi dan permasalahan yang dihadapi. Selain itu dampak pembangunan yang dihasilkan akan dirasakan sendiri oleh masyarakat desa yang bersangkutan. Inti kegiatan pemberdayaan adalah membina mereka agar dapat mengidentifikasi sendiri masalahnya serta menggali potensi yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraannya.

Adapun bentuk atau jenis partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat berupa partisipasi buah pikiran untuk mencapai mufakat atas berbagai masalah, partisipasi tenaga, yaitu kemampuan masyarakat menyumbangkan tenaga, partisipasi harta benda untuk meringankan beban hidup bersama dan sesamanya, dan partisipasi uang, yaitu kemampuan masyarakat untuk membangun swadaya gotong royong dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan (Santoso S. Hamidjoyo, 1977:8).

2. Metode Pemberdayaan Masyarakat Desa

Masyarakat lokal yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahannya harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhannya, merumuskan rencana-rencananya serta melaksanakan pembangunannya secara mandiri dan swadaya. Dengan kata lain pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat, yang lebih populer dengan sebutan pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*) (L. Hayat Satar, 2002 :13).

Agar program yang dijalankan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, masyarakat harus dilibatkan mulai dari penentuan atau pemilihan program, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Masyarakat yang dilibatkan akan merasa diberi kepercayaan sehingga akan muncul rasa tanggungjawab untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya karena keberhasilan program akan dirasakan sendiri manfaatnya oleh masyarakat.

Strategi dengan pendekatan dan metode yang sangat ini dikembangkan adalah metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*). PRA adalah sekelompok pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagai, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa membuat rencana dan bertindak atau dapat diaktakan "dari, dengan dan oleh" masyarakat desa. Secara lebih luas PRA meliputi analisis, perencanaan dan tindakan. Prinsip-prinsip yang ditekankan dalam PRA adalah :

- a. Pemberian fasilitas, artinya memberikan fasilitas penyelidikan, analisis, penjadjian dan pemahaman oleh masyarakat desa, sehingga mereka dapat menyajikan dan memiliki hasilnya, dan juga mempelajarinya.
- b. Kesadaran dan tanggungjawab diri yang kritis, artinya fasilitator secara terus menerus menguji tingkah laku mereka dan mencoba melakukannya secara lebih baik.

- c. Saling berbagai informasi dan gagasan antara masyarakat desa, antar masyarakat desa dengan fasilitator, dan antar fasilitator yang berbeda serta saling berbagi wilayah kegiatan, pelatihan dan pengalaman antar organisasi yang berbeda (Roberts Chambers, 1996:19).

Dalam PRA masyarakat desa sendiri yang lebih memiliki informasi dan saling berbagi informasi tersebut. Perilaku dan sikap orang luar yang datang menjadi fasilitator sangatlah rawan, harus rileks dan tidak boleh tergesa-gesa, mampu menunjukkan rasa hormat dan berperan sebagai fasilitator dan memiliki kesadaran kritis terhadap dirinya sendiri. Cara-cara penyelidikan, proses saling berbagai dan analisis dilakukan secara terbuka dan dapat dilihat oleh kelompok serta melalui perbandingan-perbandingan (Roberts Chambers, 1996:5).

Pendekatan memahami desa secara partisipatif di atas adalah pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat secara bersama-sama menganalisa masalah kehidupan dalam rangka merumuskan perencanaan, dan kebijaksanaan secara nyata. Metode dan pendekatan ini makin meluas diakui kegunaan ketika paradigma pembangunan berkelanjutan mulai dipakai sebagai landasan pembangunan di negara-negara sedang berkembang. Metode dan pendekatan yang tampaknya sesuai dengan tuntutan paradigma ini adalah metode dan pendekatan partisipatif. PRA dapat diaplikasikan dalam berbagai proses. Sebagian besar aplikasi itu dapat dipisahkan ke dalam empat jenis proses dan masuk ke dalam empat sektor utama. Keempat jenis proses tersebut adalah perencanaan dan penilaian, pemantauan dan evaluasi program secara partisipatif, pemeriksaan topik serta pelatihan dan orientasi bagi orang luar dan warga desa (Robert Chambers, 1996:10).

Dengan metode ini masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengemukakan pendapat dan aspirasinya sedangkan pembina hanya bertindak selaku fasilitator yang akan membantu, mengarahkan serta memberikan saran dan pertimbangan. Peran pembina dalam hal ini sangat diperlukan mengingat masyarakat yang dibina adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan baik secara ekonomi maupun dari segi pengetahuan dan ketrampilan. Hal penting yang harus diperhatikan adalah bantuan yang diberikan baik berupa pengetahuan, ketrampilan maupun finansial sifatnya hanya sebagai stimulan untuk mengajak masyarakat berpikir dan mendorong partisipasi, bukan untuk membuat masyarakat tergantung.

Keterlibatan harus dimulai sejak awal yaitu pada saat penyusunan rencana kegiatan. Sebagai contoh masyarakat diberi kepercayaan untuk membuat rencana kegiatannya. Apabila kegiatan ditujukan pada sekelompok masyarakat dengan kriteria tertentu, maka penunjukan dilakukan oleh masyarakat sendiri secara musyawarah. Hal ini dimaksudkan agar keputusan yang dibuat obyektif dan tidak menimbulkan kecemburuan. Hal ini juga penting agar program mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pada tahap pemantauan masyarakat dilibatkan dengan jalan membuat catatan dan laporan tentang program yang dijalankan. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui kesulitan serta hambatan yang timbul dan kemudian melakukan koreksi dengan bantuan pembina. Dari hasil evaluasi dan belajar dari

kesalahan masyarakat akan dapat melakukannya dengan lebih baik. Secara bertahap akan terbentuk kemandirian, sehingga setelah kegiatan pembinaan berakhir, mereka dapat melanjutkan program dan mengatasi permasalahannya sendiri. Dengan metode ini potensi dan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat juga akan tampak sehingga dapat ditangani dengan baik. Dengan demikian tujuan program pemberdayaan masyarakat desa akan tercapai sesuai dengan rencana yaitu kemandirian masyarakat. Kemandirian masyarakat ini akan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3. Faktor yang menunjang Pemberdayaan Masyarakat

Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat desa diperlukan seorang pemimpin yang memahami aspirasi dan keinginan masyarakat. Menurut Sumitro Maskun, sistem kepemimpinan di desa baik yang berlandaskan agama maupun organisasi masyarakat adalah kesisteman yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dan menghidupkan, inisiatif, kreatifitas dan produktivitas masyarakat desa. Pemimpin tersebut haruslah seorang yang memiliki sikap positif terhadap program yang akan dilaksanakan, memiliki tanggungjawab dan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat dipercaya serta memiliki kemampuan dan kreativitas yang sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan program. Pemimpin tersebut bisa berasal dari pemimpin wilayah seperti camat, kepala desa, kepala dukuh, ketua RT/RW, pemimpin suatu kelompok kegiatan seperti kelompok tani atau kelompok nelayan.

Selain itu juga dilakukan pembinaan kelembagaan, yaitu merupakan usaha menggerakkan masyarakat sesuai dengan kepentingan masing-masing. Lembaga masyarakat merupakan wadah aspirasi dan inspirasi masyarakat. Selanjutnya untuk peningkatan kualitas dan kemampuan masyarakat diperlukan bantuan pihak pemerintah serta bantuan teknis, yaitu suatu program pembangunan masyarakat desa, yang datang baik dari pemerintah maupun non pemerintah (Sumitro Maskun, 1993:13).

Selain Faktor Kepemimpinan untuk menumbuhkan semangat dan partisipasi masyarakat perlu digali nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat maupun nilai agama yang menjadi pandangan hidup masyarakat setempat. Ciri khas kehidupan desa adalah kehidupan komunalnya yang ditandai dengan masih kuatnya ikatan kebersamaan dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Kuatnya ikatan tersebut tercermin dalam berbagai sikap dan perilaku gotong royong, tolong menolong dan saling bekerjasama dalam mengerjakan suatu urusan. Selain itu masyarakat desa terbiasa untuk membicarakan berbagai urusan dengan jalan musyawarah.

Sebagaimana dikatakan oleh Soerojo Wignyodipoero bahwa hukum adat tradisional mengandung nilai-nilai universal yang salah satu diantaranya adalah asas gotong royong. Asas gotong royong kadang-kadang disebut juga asass kemasyarakatan, asas komunal dan asas kekeluargaan. Manusia dalam hukum adat adalah orang yang terikat pada masyarakat. Tiap warga mempunyai hak dan kewajiban menurut kedudukannya dalam golongan atau persekutuan yang bersangkutan (Soerojo Wignyodipoero, 1993:96). Asas gotong-royong ini menyebabkan timbulnya "paguyuban

hidup" yaitu suatu kebulatan kemasyarakatan yang masing-masing anggotanya merasa "krasan" dan "omah" karena ia merasa dapat memenuhi segala tuntutan dan merasa memperoleh jaminan bahwa segala hasrat dan kebutuhannya yang wajar akan memperoleh perhatian sepadan serta akan dipenuhi menurut kemungkinan yang ada; antara para anggota diisyafi adanya solidaritas (Soerojo Wigiyodipoero, 1982:40). Tiap warga desa menginsyafi, bahwa dengan cara kerjasama secara gotong royong, maka kepentingannya akan lebih terjamin serta lebih mudah terpenuhi daripada mengerjakan sendiri-sendiri (Soerojo Wigiyodipoero, 1982:40).

Budaya tradisional yang masih terus hidup dalam kehidupan masyarakat desa yang sangat kental dengan nuansa kebersamaan tersebut merupakan unsur pendukung keberhasilan pembangunan di desa. Potensi ini bisa dimanfaatkan untuk membantu proses pembinaan yaitu dengan cara mengumpulkan masyarakat yang akan dibina dalam kelompok-kelompok. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan wadah yang telah ada sebelumnya pada masyarakat tersebut, misalnya kelompok tani, kelompok nelayan atau perkumpulan RT/RW. Dalam kelompok tersebut mereka dapat saling bekerjasama dengan pembagian tugas masing-masing dan secara bersama musyawarah dan mufakat membicarakan segala persoalan yang ada. Selain mereka akan bertanggungjawab menjalankan perannya juga menumbuhkan semangat bekerjasama. Dari kerjasama tersebut akan timbul rasa solidaritas diantara sesama anggota, saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu segala persoalan yang perlu dibicarakan, harus dibahas dalam pertemuan anggota kelompok dengan cara musyawarah dan keputusan yang diambil merupakan kesepakatan atau mufakat para anggotanya. Cara ini akan mudah diterima oleh masyarakat karena musyawarah untuk mencapai mufakat telah menjadi kebiasaan masyarakat desa dalam menyelesaikan setiap urusan.

Berkaitan dengan upaya memanfaatkan keberadaan budaya tradisional dalam pemberdayaan masyarakat desa, berikut ini adalah empat acuan dasar yang seyogyanya dirujuk yaitu :

- a. Lembaga adat seperti sambat-sinambat dan bentuk solidaritas gotong royong lain hendaknya dihidupkan kembali bukan semata untuk mendukung kelancaran kegiatan proyek-proyek pemerintah semata melainkan juga untuk mendorong terciptanya rasa kolektivitas. Budaya tradisional dan kegiatan gotong royong yang difungsikan kembali sejauh mungkin harus mendorong terciptanya kemandirian dan menghindari ketergantungan antara warga satu dengan yang lain.
- b. Memperhatikan dan dilakukan demi kepentingan masyarakat desa atau berpusat pada rakyat. Hal itu dilakukan dengan upaya menciptakan kondisi struktur mata rantai perdagangan yang mampu menjamin hak warga masyarakat desa setempat.
- c. Dilakukan untuk mendukung berfungsinya kembali mekanisme redistributif yang bermanfaat untuk mengeliminasi terjadinya polarisasi dan beban hidup warga desa miskin yang makin berat, misalnya dengan menghidupkan kembali lumbung desa.

- d. Diarahkan untuk mendongkrak kembali berfungsinya mekanisme kontrol sosial dilingkungan desa. Semangat yang terkandung dalam lembaga rembug desa hendaknya ditransformasikan kembali dengan konteks kembali untuk mengeliminasi dan mencegah timbulnya dominasi perilaku aparat yang berlebihan (Bagong Suyanto, 1996:42).

D. KESIMPULAN

Dalam menunjang pembangunan daerah, keterlibatan masyarakat desa mutlak diperlukan dari mulai tahap awal yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan evaluasi. Upaya pemberdayaan masyarakat desa harus dilakukan dengan pendekatan *bottom-up*. Metode yang sesuai dengan prinsip pendekatan ini yang sekarang banyak digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat desa adalah PRA (Participatory Rural Appraisal) atau Memahami Desa Secara Partisipatif yang melibatkan masyarakat desa dalam tiap tahap kegiatan. Untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat upaya pemberdayaan harus ditunjang dengan peran kepemimpinan baik formal maupun informal. Selain itu perlu digali potensi sosial budaya yang telah dimiliki oleh masyarakat desa. Upaya tersebut antara lain dengan memanfaatkan lembaga yang ada seperti lembaga rembug desa yang merupakan wadah masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasinya dan lebih menghidupkan lagi suasana kebersamaan dan gotong-royong yang kental mewarnai kehidupan desa.

Daftar Pustaka

- Baratha, I Nyoman, 1991, *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Chambers, Robert, 1996, *PRA Participatory Rural Appraisal Memahami Desa Secara Partisipatif*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Hamidjojo, Santoso S., 1977, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*, UNPAD, Bandung.
- Khairuddin, H, 1992, *Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*, Liberty, Yogyakarta.
- Lubis, Saut M., 2000, *Agenda 21 Sektorial Buku 1 Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan. Upaya Mencapai Kehidupan yang Makin Berkualitas, Kerjasama Kantor Menteri Lingkungan Hidup dengan UNDP*.
- Maskun, Sumitro, 1993, *Pembangunan Masyarakat Desa Asas Kebijakan dan Manajemen*, Media Widya Mandala, Yogyakarta.

- Reni Renoati, 2003, *Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada era Otonomi Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*, (Mimbar Hukum UGM).
- Salim, Emil, 1993, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Satar, L. Hayat A, 1992, *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Studi Kasus Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pengrajin Gerabah di Desa Penujok, Kecamatan Prayo Barat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat*, Tesis MAP UGM.
- Sujali, 2001, *Paradigma Pembangunan dalam era Otonomi Daerah*, (Bahan Pelatihan Kegiatan Fisik, sosial dan ekonomi Masyarakat Code utara).
- Suyanto, Bagong, 1996, *Perangkap Kemiskinan : Problem dan Strategi*.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1982, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, PT. Gunung Agung , Jakarta.
- _____, 1993, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta.